

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan kepentingan umum. berpartisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemulihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dalam hal ini setiap sikap dan perilaku politik individu mendasari pada kehendak hati nurani secara suka rela dalam kehidupan politik.

Partisipasi politik amat penting dalam kontes dinamika perpolitikan di suatu masyarakat. Sebab dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka akan terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara umum. Dengan demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dan paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam memberikan kontribusi sebagai insan politik. Dalam hal ini peranan meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta aksi demonstrasi. Namun kegiatan-kegiatan sudah barang tentu harus dibarengi rasa sukarela individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik. Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas daripada tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat termanifestasi. Oleh karena itu,

sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan kepala desa merupakan alat untuk mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat.

Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk mempengaruhi pemerintah dalam keputusan politik. Pemilihan kepala desa sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat melalui suksesi dalam pemilihan kepala desa, peran warga masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas. Dengan adanya pemilihan kepala desa setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanasifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye.

Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi. Dan disamping itu pula kesadaran dan motivasi warga masyarakat dalam kegiatan politik sebagaimana di kemukakan tadi sangat penting untuk menopang tingkat partisipasi politik terhadap pemilihan kepala desa. Karena dengan adanya sikap antusias dari warga masyarakat dalam partisipasi politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil. Oleh karena kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan stabilitas politik

masyarakat dengan kesadaran dan pemahaman politik pula setiap sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadang kala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan kepala desa. Yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye). Fenomena-fenomena ini selalu muncul dimana-mana lebih-lebih lagi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Uraian yang dikemukakan tersebut dapat melahirkan suatu kesimpulan bahwa pemahaman nilai-nilai politik dalam masyarakat merupakan hal yang penting dalam mewujudkan intensitas partisipasi politik warga masyarakat secara sukarela dan eksis dalam kegiatan-kegiatan politik.

B. Identifikasi Masalah

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya maka perlu dijelaskan indentifikasi masalahnya. Dengan adanya identifikasi masalah dapat mempermudah penulisan dalam melekukan analisis secara mendalam dan dapat menghindari pemakaian istilah yang tidak tepat. Bedasarkan hal tersebut, maka menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih sebagian besar anggota masyarakat enggan melakukan hak pilih dalam Pilkades
2. Adanya rasa pasif dalam mengikuti kegiatan politik (kampanye)

3. Bagaimana proses pencalonan, proses pemilihan, sehingga dia terpilih sebagai Kepala Desa.
4. Factor pendukung dan penghambat terwujudnya pemerintahan demokrasi.

C. Pembatasan Masalah

Sebelum dikemukakan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan masalah. Dalam buku kamus Bahasa Indonesia Poerwadarmita mengatakan “ masalah berarti soal yang harus dipecahkan”.

Sedangkan menurut Nasution (2007:20), yang menyatakan bahwa:

Analisis masalah juga membatasi ruang lingkup Masalah. Disamping itu masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih terarah. Lagi pula dengan demikian kita peroleh gambaran yang jelas, apabila penelitian itu dapat dianggap selesai dan berakhir. Pembatasan ini diperlukan bukan saja untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah bagi penyelidik tetapi juga untuk dapat menetapkan lebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk pemecahannya.

Sesuai dengan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa masalah merupakan persoalan-persoalan yang timbul dalam berbagai hal yang mengandung arti adanya suatu tantangan atau hambatan-hambatan yang harus diselesaikan.

Untuk mempermudah penelitian ini dilapangan perlu diberi batasan masalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran, hal ini berguna agar dalam melaksanakan penelitian dapat terarah.

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi politik masyarakat dalam meujudkan pemerintahan yang demokrasi

2. Factor yang pendukung dan penghambat terwujudnya pemerintahan yang demokrasi.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang utama dalam suatu penelitian. Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap masalah yang dibicarakan maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis?
2. Apa sajakah factor pendukung dan penghambat terwujudnya pemerintahan yang demokratis?

E. Tujuan Penelitian

Sudah merupakan hal yang lazim bagi setiap orang yang melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan tujuan apa yang hendak dicapai, sebab tanpa tujuan segala yang dilakukan akan membawa hasil yang sia-sia.

Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Nasution (2007:17) :

Tiap penelitian harus mempunyai tujuan atau tujuan-tujuan yang harus dicapai. Tujuan bertalian erat dengan masalah yang dipilih serta analisis masalah itu. Tidak ada ketentuan berapa banyak tujuan yang harus dicapai dalam suatu tesis. Banyaknya tujuan dapat mengakibatkan banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang dekrasi

2. Untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat terwujudnya pemerintahan yang demokrasi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penulisan karya ilmiah bagi penulis.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini menjadi suatu bahan perbandingan tentang tingkat partisipasi politik masa mendatang.
3. Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat kepada saya, kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa UNIMED Jurusan PP-Kn, agar bisa mencerna apa-apa yang ada pada penelitian ini untuk dijadikan sebagai referensi untuk meneliti yang lebih baik dari penelitian ini.